

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan mengacu pada pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan dikatakan bertanggung jawab secara sosial dapat dilihat dari sejauh mana keputusan yang diambil pihak manajemen dalam memperhatikan juga kepentingan *stakeholder*, bukan hanya kepentingan pemegang saham.<sup>12</sup> Pada umumnya, teori pemangku kepentingan berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengatur *stakeholdernya*, sehingga dalam pelaksanaan tanggung jawabnya perusahaan memperhatikan sisi strategis pada *stakeholder*.<sup>13</sup>

Freeman dan Reed yang dikutip oleh Solihin menyebutkan dua pengertian *stakeholder*, yaitu *stakeholder* dalam arti luas dan *stakeholder* dalam arti sempit. Dalam arti luas, *stakeholder* diartikan sebagai kelompok atau individu yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan bahwa perusahaan mempunyai ketergantungan kepada *stakeholder* untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dimana *stakeholder* tersebut terdiri dari kelompok atau individu tertentu saja.

Para *stakeholder* mempunyai kepentingan yang riil dalam mendukung atau justru menjadi penghalang perusahaan dalam mencapai tujuannya, sedangkan perusahaan mempunyai hak untuk mengambil keputusan yang berdampak terhadap *stakeholder* dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, perusahaan sebisa mungkin harus mampu mengelola dengan baik hubungan perusahaan

---

<sup>12</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility*, 38

<sup>13</sup> Aviciena Zanjabil dan Adityawarman, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 3 (2015), 3, dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/16995&ved>

dengan para *stakeholder* dengan membuat keputusan yang juga memperhatikan stakeholdernya, dimana keputusan tersebut untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.<sup>14</sup>

Teori pemangku kepentingan menjadi landasan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pelaporan kinerja keuangan perusahaan yang didalamnya diungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, yang mana pengungkapan tersebut tidak lepas dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik, dianggap dapat memenuhi kewajiban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Hal ini sebagaimana teori pemangku kepentingan yang menyebutkan bahwa sebuah perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan para *stakeholdernya*.

## 2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) hingga saat ini belum terdapat pengertian yang diakui secara global. Hal ini dikarenakan pengertian dan komponen CSR dalam setiap Negara atau daerah tidak selalu sama. Akan tetapi, secara umum, CSR merupakan interaksi perusahaan dengan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pemenuhan hukum, penghargaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar serta kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan membicarakan pengelolaan perubahan pada perusahaan yang dijelaskan dalam dua dimensi berbeda sebagaimana berikut.

- a. Internal, berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan karyawan, investasi perusahaan, perubahan modal, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dalam proses produksi perusahaan.
- b. Eksternal, berkaitan dengan masyarakat sekitar dan para pemangku kepentingan lainnya dari luar perusahaan seperti mitra usaha, pemasok, konsumen, lingkungan alam dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009), 57

<sup>15</sup> Totok Mardikanto, *CSR(Corporate Social Responsibility)*, (Bandung:Alfabeta,2014) 90

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif islam dijelaskan sebagai hubungan antara kegiatan ekonomi dengan moral pelaku ekonomi, dimana hubungan tersebut berkaitan sangat erat. Islam menjelaskan bahwa proses ekonomi umat tidak hanya bertujuan menghasilkan laba yang besar, tetapi juga diharapkan mendatangkan kesejahteraan (*falah*). Islam mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian para pelaku ekonomi terhadap sesama manusia, lingkungan sekitar maupun keadaan sosial masyarakat.

Proses pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara islami harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat mencapai *maqasid al-syariah* dan *maslahah*. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan dapat menyentuh kepatuhan dasar masyarakat sehingga memperkuat ekonomi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dilakukan berdasarkan perintah undang-undang atau sebatas agar mendapat citra baik dari masyarakat sehingga mendapat laba yang besar, tetapi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada rasa tanggung jawab atas perintah Allah SWT.<sup>16</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya : “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat *zarrah*, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat *zarrah*, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (QS. Az-Zalzalah : 7-8)<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility*, 43-48

<sup>17</sup> Alquran, Az-Zalzalah ayat 7-8, *Syaamil Quran Edisi Khat Madinah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 599

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap individu harus memperhatikan segala bentuk tindakan dan keputusan yang akan dilakukan, karena kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Hal ini juga berlaku bagi para pelaku usaha bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Abdul Ghani menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut.

a. Kesadaran etis pelaku bisnis

Para pelaku bisnis mempunyai kesadaran etika dalam menjalankan usahanya. Kesadaran tersebut antara lain berupa keputusan untuk menjalankan perusahaan secara adil dan memberi bantuan kepada masyarakat sekitar perusahaan. Para pelaku bisnis menyadari hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dimana masyarakat adalah bagian dari komunitas yang saling terpengaruh. Hubungan harmonis yang dapat dibangun perusahaan dengan masyarakat sekitar menjadikan kelangsungan perusahaan dapat terjaga. Oleh karena itu, program tanggung jawab sosial kepada masyarakat perlu dilakukan perusahaan.

b. Tuntutan masyarakat sekitar

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat menjadikan masyarakat sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Kesadaran tersebut menjadikan masyarakat menuntut perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya. Masyarakat menyadari bahwa kegiatan operasional perusahaan akan memberi dampak kepada masyarakat sekitar secara langsung dan menyeluruh.

c. Peran pemerintah

Pemerintah merupakan pembuat kebijakan publik, termasuk hak dan kewajiban antara masyarakat dan perusahaan seperti pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah melalui daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu dengan menjadi mengatur program tanggung jawab sosial agar tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Selain

itu, pemerintah mempunyai peran sebagai penengah antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

d. Tuntutan konsumen dan investor

Opini konsumen memiliki pengaruh yang kuat terhadap kelangsungan produk dan kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membangun hubungan yang baik dengan konsumen sehingga terbentuk citra produk dan perusahaan yang baik. Perusahaan dengan penerapan etika dalam berbisnis yang melebihi harapan konsumen akan meningkatkan posisinya di mata konsumen dan investor.<sup>18</sup>

### 3. Kinerja Keuangan

Nurlela menyebutkan kinerja keuangan yaitu sebuah prestasi kerja yang dicapai oleh perusahaan selama periode tertentu yang dituangkan dalam laporan keuangan. Seberapa baik kinerja perusahaan dilihat dari kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan yang dijelaskan dalam laporan keuangan.<sup>19</sup> Laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan dibuat oleh pihak manajemen, sehingga laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap sumber daya yang dipercayakan. Pemakai laporan keuangan tidak hanya pihak di dalam perusahaan, melainkan meliputi seluruh pemangku kepentingan dengan kebutuhan informasi yang berbeda dari masing-masing pemangku kepentingan.<sup>20</sup>

Islam menghendaki umatnya agar selalu taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya (*taqwa*). Perintah *bertaqwa* ini tidak hanya dalam menjalankan ibadah *mahdhah* saja, tetapi juga dalam menjalankan ibadah *ghairu mahdhah*, diantaranya adalah bermuamalah. Berhubungan dengan sesama manusia, kita diperintahkan untuk

---

<sup>18</sup> Mohammad Abdul Ghani, *Model CSR Berbasis Komunitas : Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, (Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2016), 83

<sup>19</sup> Lela Nurlela Wati, *Model Corporate Social Responsibility (CSR)* (Ponorogo : Penerbit Myria Publisher, 2019), 27 dalam <https://books.google.co.id/books?id=IKPHDwAAQBAJ&printsec=>

<sup>20</sup> Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Modern* (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2011), 65

menggunakan cara yang baik sesuai ajaran islam. Hal ini juga berlaku ketika seorang manajer perusahaan melaporkan kinerja keuangannya. Mengingat, laporan keuangan merupakan salah satu alat yang dipakai para *stakeholder* dalam membuat keputusan bagi perusahaan. Hendaknya para manajer melaporkan kinerja keuangan perusahaan dengan jujur dan adil. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ : 29)<sup>21</sup>

Ayat tersebut mengingatkan kita untuk senantiasa berlaku benar dan jujur dalam setiap aktivitas, termasuk pada saat melaporkan kinerja keuangan perusahaan. Ayat tersebut juga memperingatkan kita untuk tidak memakan harta orang lain. Dalam kaitannya dengan pelaporan kinerja keuangan, hendaknya untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya dan tidak mengambil hak-hak orang lain. Sehingga, para pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang sesuai kenyataan dan dapat membuat keputusan yang tepat untuk kebaikan perusahaan.

Laporan keuangan bersifat historis dan menyeluruh, sehingga diperlukan teknik analisis laporan keuangan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dimengerti dan menjadi dasar pengambilan keputusan pihak yang

<sup>21</sup> Alquran, An-Nisa’ ayat 29, *Syaamil Quran Edisi Khat Madinah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 83

membutuhkan. Teknik analisis yang dapat digunakan adalah analisis perbandingan laporan keuangan, *common size statement*, analisis trend, analisis sumber dan penggunaan modal kerja dan kas, analisis perubahan laba kotor, analisis *break even point* dan analisis rasio.

Menurut Najmudin analisis rasio keuangan diartikan sebagai teknik analisis yang menjelaskan hubungan dua elemen laporan keuangan yang menjadikan pelaku bisnis melakukan analisis posisi dan kinerja keuangan dari sebuah perusahaan. Rasio keuangan yang dianalisis dengan tepat dapat menjadi tolak ukur kesehatan keuangan perusahaan dan dapat menunjukkan lebih dini jika terdapat potensi masalah sebelum menjadi krisis yang lebih serius. Rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi lima jenis sebagai berikut.<sup>22</sup>

- a. Rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan.
- b. Rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan sumber daya atau seberapa efisien penggunaan aset perusahaan untuk mendapatkan penjualan.
- c. Rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.
- d. Rasio *leverage*, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai hutang pihak luar.
- e. Rasio saham, yaitu rasio yang menunjukkan bagian dari laba perusahaan, dividen, dan modal yang dibagikan dalam setiap saham.

Rasio-rasio tersebut sering digunakan untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Akan tetapi, dalam penelitian ini kinerja keuangan perusahaan diukur menggunakan dua jenis rasio, yaitu rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas (*leverage*).

#### a. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan (laba) secara

---

<sup>22</sup> Najmudin, *Manajemen Keuangan*, 86

menyeluruh, mengubah penjualan menjadi keuntungan dan arus kas. Tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui dengan rasio berikut.

- 1) Rasio margin laba bersih (*net profit margin ratio*). Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak. Rasio margin laba bersih digunakan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Batas minimum hasil yang ditunjukkan rasio ini setidaknya sama dengan bunga umum. Semakin besar rasio yang dihasilkan maka semakin baik bagi perusahaan. Rasio margin laba bersih mempunyai peran bagi manajemen sebagai berikut.
  - a) Alat ukur terbaik yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan.
  - b) Menghitung secara menyeluruh mengenai efisiensi operasi perusahaan.
  - c) Berperan dalam pengambilan keputusan manajemen.
- 2) Rasio imbal hasil aset (*return on assets/ROA*). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang ada. ROA diartikan sebagai seberapa besar tingkat perolehan laba perusahaan untuk menambah aset perusahaan. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin baik bagi perusahaan.
- 3) Rasio imbal hasil ekuitas (*Return on Equity/ROE*). Rasio ini menjelaskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba untuk mensejahterakan pemilik modal (investor). Rasio ini diartikan pula seberapa besar perolehan laba yang dapat digunakan untuk menambah modal pemilik. ROE dihitung dengan membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap total ekuitas. Semakin besar

rasio yang dihasilkan maka semakin baik bagi perusahaan.<sup>23</sup>

#### b. *Leverage*

*Leverage* atau rasio solvabilitas merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* digunakan pihak eksternal perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya ketika perusahaan tersebut membutuhkan atau mengajukan pinjaman jangka panjang kepada lembaga keuangan tersebut. *Leverage* merupakan gambaran stabilitas keuangan dari seluruh utang perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa besar kemampuan modal mengatasi utang perusahaan agar operasional perusahaan dapat bergerak. Perusahaan akan dikatakan solvabel ketika perusahaan mampu membayar seluruh utangnya, sedangkan dikatakan insolvel ketika perusahaan tidak mampu melunasinya. Tingkat solvabilitas perusahaan dapat diketahui melalui rasio berikut.

- 1) Rasio utang terhadap aset (*debt to assets ratio*). Rasio ini menunjukkan jumlah utang yang dibiayai dengan aset perusahaan. Rasio ini menggambarkan perbandingan aset perusahaan yang berasal dari utang dan pemilik. Semakin rendah hasil rasio maka semakin baik bagi perusahaan.
- 2) Rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio/DER*). Rasio ini menjelaskan seberapa besar jaminan perusahaan dalam membiayai utang dengan modal perusahaan. DER menghasilkan proporsi pemilik perusahaan. Semakin rendah hasil yang ditunjukkan rasio ini maka akan semakin baik bagi perusahaan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Pirmatua Sirait, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta : Ekuilibria, 2017), 141

<sup>24</sup> Pirmatua Sirait, *Analisis Laporan Keuangan*, 134

#### 4. *Islamic Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* memiliki tujuan utama yaitu membuat sistem pengendali agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan meningkatkan laju pertumbuhan perusahaan. *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik dijelaskan dengan dua proses internal dan eksternal perusahaan, dimana proses internal fokus pada proses pemimpin menjalankan perusahaannya agar sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Sementara itu, proses eksternal berkaitan dengan pengelolaan hubungan perusahaan dengan pihak luar perusahaan dengan tidak mengesampingkan tujuan perusahaan.

Tata kelola perusahaan dapat diimplementasikan secara tepat dengan memahami prinsip-prinsip umum *Good Corporate Governance* sebagai berikut.<sup>25</sup>

- Akuntabilitas.** Manajemen harus mampu melaporkan kepada semua pemangku kepentingan tentang peran yang telah dilakukan para pemangku kepentingan.
- Transparansi.** Manajemen menyediakan informasi dengan akurat, relevan dan mudah dipahami.
- Independensi.** Pengelolaan perusahaan hanya untuk kepentingan perusahaan tanpa dicampuri dengan aktivitas lain yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan tersebut.
- Responsibility.** Perusahaan harus dikelola sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku.
- Fairness.** Perusahaan dikelola sebaik mungkin dengan memberi jaminan perlindungan kepada seluruh pemangku kepentingan.

*Islamic Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan islami merupakan sebuah peraturan tentang bagaimana perusahaan diarahkan, diatur dan diawasi oleh prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dengan basis syariah mampu menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian),

---

<sup>25</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), 292-293 dalam <https://books.google.co.id/books?id=3F5nDwAAQBAJ&printsec>

dan *maysir* (perjudian). Tata kelola islam bertujuan agar tercapainya *falah* (kesejahteraan) yang menjadi tujuan hakiki sebuah perusahaan dengan basis syariah, dimana semua kepentingan para *stakeholder* dapat dipenuhi, tujuan umum perusahaan dapat dicapai dan tentunya prinsip-prinsip syariah dapat dipatuhi. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 61 :

﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا

لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ

فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, ‘Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)’.” (QS. Hud : 61)<sup>26</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang misi utama manusia, yaitu memakmurkan (membangun) bumi. Tata kelola perusahaan islami mengatur sedemikian rupa agar tujuan perusahaan dapat dicapai tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Pihak manajemen yang memiliki wewenang untuk mengelola perusahaan diarahkan agar dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat dan lingkungan alam.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Alquran, Hud ayat 61, *Syaamil Quran Edisi Khat Madinah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 228

<sup>27</sup> Joko Setyono, “Good Governance dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1, (2015) : 36 dalam <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/>

Tata kelola perusahaan yang baik dalam perspektif islam harus memenuhi prinsip-prinsip islam secara umum sebagaimana berikut.<sup>28</sup>

**a. Tauhid**

Tauhid adalah sebuah prinsip ke-esa-an Tuhan, dimana manusia harus bahwa tuhan Maha Satu, tunggal dan tidak membutuhkan bantuan dari manapun. Tauhid merupakan dasar dari seluruh ajaran islam, termasuk dalam hal berhubungan dengan sesama manusia (*muamalah*). Hal ini berarti setiap umat dalam melakukan aktivitasnya hendaknya mengetahui dan menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dalam kitab suci Al-Qur'an dan sabda Rasul-Nya.

**b. Taqwa dan Ridha**

Taqwa merupakan berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal, sedangkan ridha adalah kerelaan menerima hasil yang diberikan Allah atas usaha yang dilakukan. Secara spesifik, implementasi taqwa dan ridha dalam perusahaan dengan basis syariah berarti perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya hendaknya menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dan selalu bersikap menerima terhadap risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Misalnya, dalam proses perdagangan hendaknya berikap rela dan tidak memaksakan keputusan pembelian oleh pelanggan.

**c. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan)**

Konsep keadilan dalam islam dikenal dengan *tawazun* (keseimbangan) dan *al-'adalah* (keadilan). *Tawazun* dalam konteks sosial kemasyarakatan biasanya menjelaskan lingkungan fisik, sedangkan *al-'adalah* merupakan bentuk sosial. Keseimbangan antara lingkungan fisik maupun sosial harus senantiasa dijaga dengan baik. Hal ini berarti setiap pihak yang saling terikat dalam sebuah perusahaan dituntut agar senantiasa bersikap benar dalam mengungkap

<sup>28</sup> Firman Menne, *Nilai-nilai Spiritual dalam Entitas Bisnis Syariah* (Makassar : Celebes Media Perkasa, 2017), 60 dalam <https://books.google.co.id/books?id=CiZtDwAAQBAJ&printsec>

keadaan, menunaikan perjanjian ataupun memenuhi kewajibannya.

#### d. Kemaslahatan

Tata kelola islam yang direalisasikan dengan menegakkan otoritas kepemimpinan dan keagamaan dimaksudkan agar terjaganya keseimbangan fisik dan sosial serta tercapainya tujuan syariah islam (*maqasidus syariah*) yang tidak lain adalah kemaslahatan seluruh umat manusia sebagai wujud islam yang rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, perusahaan berbasis syariah secara khusus juga mempunyai tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat di dunia maupun di akhirat.

Selain empat prinsip syariah tersebut, secara lebih terperinci Sholihin menyebutkan prinsip-prinsip syariah yaitu *al-'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berpikir positif), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *hurriyah* (independensi), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi), *tabligh* (keterbukaan), *siddiq* (kejujuran), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (cerdas), *akhlaq* (moral), *ihsan* (profesional), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *raqabah* (pengawasan), serta *qiraah* dan *ishlah* (terus belajar dan melakukan perbaikan).<sup>29</sup>

Pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan islam dalam operasional perusahaan dituangkan dalam sebuah mekanisme. Adanya mekanisme tersebut dimaksudkan agar operasional perusahaan dapat berjalan ke arah yang telah ditetapkan dengan baik. Mekanisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme internal dengan menggunakan proksi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dewan komisaris, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional.

#### a. Dewan Pengawas Syariah

Tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah seyogyanya mengacu pada prinsip umum *good corporate governance*, diantaranya prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran. Hal ini menjadikan bank syariah melakukan penyesuaian antara

<sup>29</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 294

prinsip umum tersebut dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada institusi keuangan syariah akan sesuai dengan prinsip syariah melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Operasional bank syariah harus mematuhi prinsip syariah seperti larangan *riba*, *gharar*, *maysir* dan larangan syariah lainnya, sehingga diperlukan garis panduan yang mengatur proses operasional bank syariah. Panduan tersebut dibuat dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang menerima kepercayaan dari DSN untuk mengawasi proses operasional dan praktik institusi keuangan syariah agar sesuai dengan kepatuhan syariah. Dewan pengawas syariah dipilih oleh dewan komisaris melalui rapat umum pemegang saham dengan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Anggota dewan pengawas syariah harus ahli dibidang fiqh muamalah serta pengetahuan umum perbankan syariah. Pengawasan dewan pengawas syariah mengacu pada fatwa DSN mengenai kesesuaian antara produk dan jasa bank syariah dengan ketentuan dalam fatwa DSN.<sup>30</sup> Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi sebagaimana berikut.

- 1) Sebagai penasehat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara bank syariah dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 3) Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ditempatkan pada bank syariah.

#### **b. Dewan Komisaris**

Dewan komisaris memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan proses tata kelola perusahaan yang baik. Keberhasilan sebuah perusahaan bergantung pada dewan komisaris. Dewan komisaris menjadi penjamin dan pengawas terlaksananya strategi perusahaan dan manajemen. Dewan komisaris memiliki tugas utama sebagai berikut.

---

<sup>30</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility*, 69

- 1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan serta mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan.
- 2) Menilai sistem penggajian pejabat dan dewan direksi serta bertanggung jawab dalam proses pencalonan dewan direksi.
- 3) Mengawasi dan menyelesaikan masalah dari tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan antar anggota dewan komisaris.
- 4) Memantau proses pengelolaan perusahaan.
- 5) Memonitor efektivitas proses komunikasi perusahaan.<sup>31</sup>

### c. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya sebuah perusahaan yang diukur dengan kinerja keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan adanya perbedaan risiko usaha dari perusahaan yang berukuran besar dengan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan menjadikan manajemen semakin mudah dalam mengelola perusahaan sehingga kinerja perusahaan semakin meningkat. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan akan menghasilkan proses produksi yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.<sup>32</sup>

Sering kali dipahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan hanya dilakukan oleh perusahaan dengan ukuran yang lebih besar. Hal ini dikarenakan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sering membutuhkan biaya yang lebih besar, sehingga perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil mengalami kesulitan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Akan tetapi, pendapat Thendri dalam Mardikanto menjelaskan bahwa tidak perlu menjadi perusahaan besar terlebih dahulu jika melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

---

<sup>31</sup> Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan : Studi untuk Perusahaan Telekomunikasi* (Medan : Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018), 12 dalam <https://books.google.co.id/books?id=fxeZDwAAQBAJ&pg=PA30&dq>

<sup>32</sup> Lela Nurlela Wati, *Model Corporate Social Responsibility*, 31

Menurut Thendri dalam Mardikanto, hal terpenting yang harus dimiliki perusahaan bukanlah biaya, namun keinginan yang kuat untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya, merasa peduli kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, serta tidak hanya berorientasi pada laba yang akan diperoleh perusahaan. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan Haniffa dan Cooke menjelaskan bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara luas, program yang banyak dan memiliki dampak yang lebih dirasakan oleh masyarakat, daripada perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang lebih ketat dari masyarakat terhadap perusahaan besar dikarenakan masyarakat lebih terkena dampak yang lebih besar pula.<sup>33</sup>

#### d. Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan perusahaan diartikan sebagai struktur kepemilikan atas saham yang dikeluarkan perusahaan. Sebuah perusahaan mendapat modal salah satunya adalah dengan mengeluarkan saham yang tidak hanya dimiliki pihak manajemen tetapi juga dapat dimiliki oleh investor dari luar perusahaan. Hal ini menjadikan adanya perbedaan jumlah saham yang dimiliki manajemen (kepemilikan manajerial) dengan saham yang dimiliki publik. Sebagaimana telah dijelaskan, dalam teori agensi disebutkan bahwa sebuah perusahaan diwakili oleh pihak manajemen bertindak sebagai agen, sedangkan para pemegang saham bertindak sebagai prinsipal. Adanya struktur kepemilikan ini akan memantau kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.<sup>34</sup>

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi/lembaga baik pemerintah maupun swasta. Kepemilikan institusional diukur dengan jumlah presentase

<sup>33</sup> Totok Mardikanto, *CSR*, 204

<sup>34</sup> Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Social Responsibility*,

kepemilikan institusional dalam perusahaan. Sebuah institusi menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan dengan membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan pihak institusi dapat memperoleh hak suara yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Artinya, tidak menutup kemungkinan pihak institusi akan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan berhak atas keputusan yang diambil pihak manajemen.<sup>35</sup> Berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, penelitian yang dilakukan oleh Nita Andriyani menyebutkan bahwa pengawasan yang ketat oleh institusi pemegang saham mayoritas mengakibatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan oleh manajemen semakin terbuka.

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi rujukan dan pedoman penulis dalam melakukan penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini tidak dapat lepas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian pada periode-periode sebelumnya, akan disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| No. | Peneliti                | Judul Penelitian                                                                                                                                           | Variabel                                                                                                                          | Hasil                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Charles, Chariri (2012) | Analisis Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi Kasus pada Bank Syariah di Asia) | X1 = <i>Islamic Governance Score</i><br>X2 = Dewan Komisaris<br>X3 = Komisaris Independen<br>X4 = Frekuensi Rapat Dewan Komisaris | Variabel <i>Islmaic Governance Score</i> , Dewan Komisaris dan Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan |

<sup>35</sup> Syarifah Rahmawati, *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*, (Banda Aceh : Syiah Kuala University Press, 2017), 77

|    |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                              | <p>X5 = Ukuran Komite Audit</p> <p>X6 = Komposisi Komite Audit Independen</p> <p>X7 = Jumlah Rapat Komite Audit</p> <p>X8 = Profitabilitas</p> | <p>CSR pada bank syariah. Sedangkan variabel Komisararis Independen, Frekuensi Rapat Dewan Komisararis, Ukuran Komite Audit, Komposisi Komite Audit Independen dan Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan CSR pada bank syariah.</p> |
| 2. | <p>Rena Mustari Mokoginta, Herman Karamoy, Linda Lambey</p> | <p>Pengaruh Komisararis Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas terhadap tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Bank Syariah di Indonesia</p> | <p>X3 = Komisararis Independen</p> <p>X1 = Dewan Pengawas Syariah</p> <p>X9 = Kepemilikan Institusional</p> <p>X8 = Profitabilitas</p>         | <p>Variabel Dewan Pengawas Syariah mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank syariah, sedangkan tiga variabel lain, yaitu variabel Komisararis Independen,</p>                                                                  |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               | Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah.                                                                                                                                                                |
| 3. | Febry Ramadhani (2016)   | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014) | X10 = Ukuran Perusahaan<br>X8 = Profitabilitas<br>X11 = <i>Leverage</i><br>X1 = Ukuran Dewan Pengawas Syariah | Variabel Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada bank syariah, sedangkan variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada bank syariah. |
| 4. | Ismawati Haribowo (2015) | Analisis Pengaruh <i>Islamic Corporate</i>                                                                                                                                                                         | X1 = <i>Islamic Corporate Governance</i><br>X2 = Ukuran                                                       | Variabel Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | <p><i>Governance terhadap Corporate Social Responsibility</i> (Studi Kasus pada Bank Syariah di Indonesia)</p> | <p>Dewan Komisaris X3 = Komisaris Independen X4 = Frekuensi Rapat Dewan Komisaris X5 Ukuran Komite Audit X6 = Komposisi Komite Audit Independen X7 = Jumlah Rapat Komite Audit X8 = Profitabilitas X12 = Likuiditas Y = <i>Corporate Social Responsibility</i></p> | <p>secara signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan variabel lainnya, yaitu <i>Islamic Corporate Governance</i>, Komisaris Independen, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Komposisi Komite Audit Independen, Jumlah Rapat Komite Audit, Profitabilitas dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Kemudian, pengujian variabel secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada bank syariah.</p> |
| 5. | Tufik, Marlina | Pengaruh <i>Islamic</i>                                                                                        | X1 = <i>Islamic Governance</i>                                                                                                                                                                                                                                     | Variabel <i>Islamic</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                          |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Widianti, Rofiqoh (2015) | <i>Governance Score, Leverage dan Profitabilitas terhadap Islamic Social Reporting Index pada Bank Umum Syariah di Indonesia</i> | <i>Score X11 = Leverage X8 = Profitabilitas Y = Islamic Social Reporting Index</i> | <i>Governance Score tidak berpengaruh signifikan terhadap ISR Index, Variabel Leverage berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ISR Index, variabel Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap ISR Index, serta pengujian variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ISR Index.</i> |
|--|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

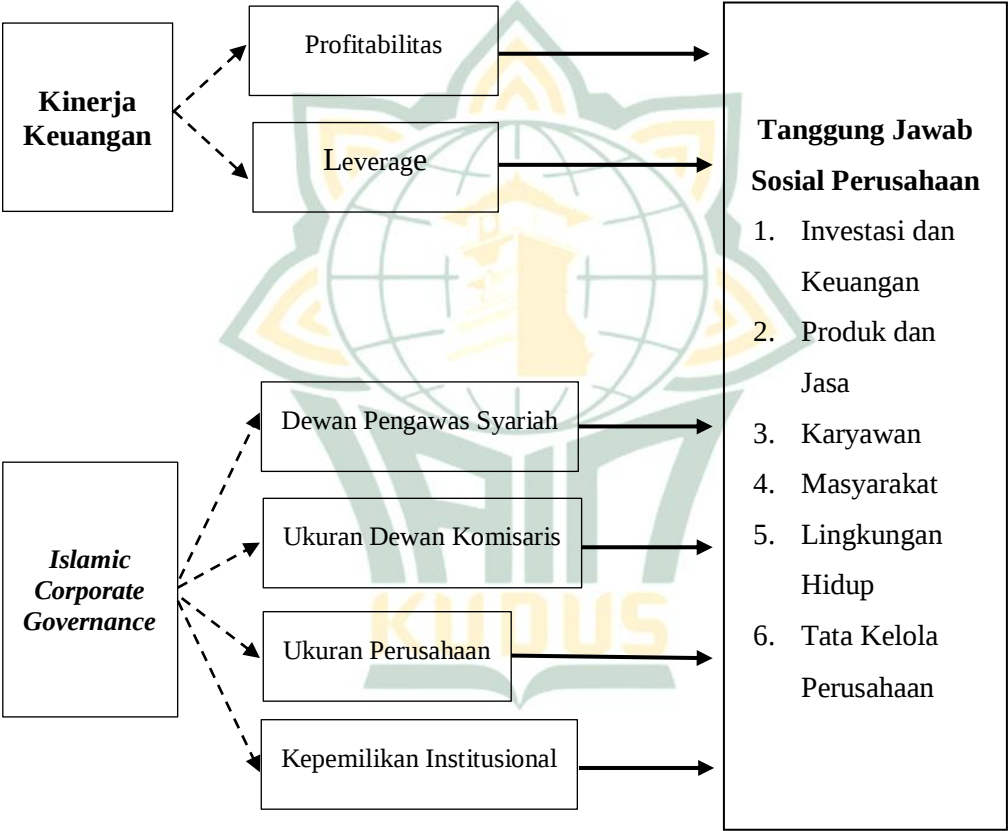
C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang baik yaitu sebuah gambaran yang dapat memberi penjelasan teoritik dari hubungan antarvariabel yang akan diuji. Hal ini berarti secara teoritis, sebuah penelitian perlu dijelaskan mengenai hubungan antara variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian.<sup>36</sup> Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu enam variabel bebas (independen) dan satu variabel teikat (dependen). Adapun variabel independen yang digunakan yaitu kinerja keuangan yang diproksikan profitabilitas ( $X_1$ ) dan *leverage* ( $X_2$ ), dan variabel

<sup>36</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), 66.

islamic corporate governance yang diproksikan jumlah DPS ( $X_3$ ), jumlah dewan komisaris ( $X_4$ ), ukuran perusahaan ( $X_5$ ) dan kepemilikan institusional ( $X_6$ ). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan (Y). Berdasarkan penelitian terdahulu dan kajian teori di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



## D. Hipotesis

### 1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia

Felicia dalam penelitiannya menjelaskan pengertian profitabilitas sebagai indikator kinerja perusahaan yang dikelola oleh manajemen mengenai keuangan perusahaan dengan menggunakan laba perusahaan sebagai ukurannya. Penelitian Felicia menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayuni bahwa pengaruh tersebut disebabkan perusahaan akan cenderung melakukan intervensi kebijakan ketika memiliki profit yang tinggi. Perusahaan akan melaporkan secara rinci untuk menekan biaya politik dan memperlihatkan kinerja perusahaan kepada masyarakat luas.

H1 = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

### 2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia

*Leverage* merupakan besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang yang berasal dari kreditor, bukan pemegang saham. Penelitian yang dilakukan Felicia menunjukkan adanya pengaruh antara *leverage* dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Cahyo yang menjelaskan bahwa *leverage* yang tinggi menjadikan perusahaan terdorong untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

H2 = *Leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

### 3. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan institusi pengawasan internal dalam lembaga keuangan syariah. Keharusan akan keberadaan DPS dalam lembaga keuangan syariah dikarenakan DPS merupakan penentu kredibilitas bank syariah, sebagai penjamin kepatuhan bank syariah

terhadap prinsip-prinsip syariah serta merupakan bagian dari pelaksana tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah. Beberapa peran penting DPS tersebut menjadikan DPS tidak hanya ahli dalam bidang keuangan, namun juga diharapkan memahami hukum islam. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Zanjabil, bahwa DPS mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Keberadaan dan keahlian DPS yang mumpuni menjadikan pengawasan terhadap manajemen akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H3 = Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

#### 4. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia

Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Pendapat Collar dan Gregory yang dikutip oleh Rahayu menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris menjadikan pengendalian CEO semakin mudah dan pengawasan akan semakin efektif. Hal ini juga meliputi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dimana manajemen akan mendapatkan tekanan yang semakin besar untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, atau dengan kata lain pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat. Hasil penelitian Rahayu tersebut konsisten dengan penelitian Nita Andriyani dan Sulis Rochayatun bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H4 = Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

#### 5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh Dharmawan menjelaskan bahwa semakin besar sumber daya perusahaan

akan menjadikan perusahaan semakin berupaya memperoleh *legitimacy* (pengakuan) dari para pemegang kepentingan perusahaan. Perolehan pengakuan tersebut dilakukan dengan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan yang besar mempunyai *political visibility* yang tinggi sehingga tuntutan publik agar lebih transparan semakin besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mungky Felicia, Rika Yuliawati dan Marzully Nur bahwa perusahaan yang besar secara sukarela akan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan secara luas. Hal ini berarti ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

H5 = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

#### 6. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia

Kepemilikan saham merupakan kepemilikan atas saham oleh investor yang berbentuk lembaga/institusi. Pada umumnya, investor institusi akan mendapatkan saham yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hal ini menjadikan institusi tersebut dapat melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap manajemen perusahaan. Presentase kepemilikan institusional yang semakin tinggi mengakibatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin ketat pula. Hal ini mengakibatkan manajemen akan mengungkapkan laporan perusahaan secara terbuka dan menyeluruh. Hasil penelitian Nita Andriyani menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan investor ketika melakukan penanaman modal kepada perusahaan. Hal ini menjadikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan harus diungkapkan secara terperinci dalam laporan tahunan.

H6 = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan